

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman, yang telah di nobatkan sebagai juara II festival Desa Wisata Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dengan kategori desa wisata mandiri. Penulis memilih Desa Wisata Pentingsari sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini memberikan kontribusi ekonomi terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Berbicara mengenai kontribusi desa wisata sebagai sarana memperkuat perekonomian nasional, dalam mengatasi problem kemiskinan untuk saat ini desa wisata mendapatkan perhatian lebih, itu dikarenakan kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial dan menjadi suatu isu sentral setiap negara didunia, khususnya bagi negara-negara berkembang, namun hal tersebut menjadi konsekuensi yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata, akan tetapi masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Kondisi kemiskinan di Jawa sangat berbeda dengan di luar Jawa, bahkan di luar Jawa lebih banyak disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong, dikarenakan terpencilnya suatu daerah, namun kemiskinan di Jawa dilatarbelakangi oleh sempitnya lahan produktif pertanian yang dimiliki

oleh penduduk untuk menompang keberlangsungan penghidupan penduduk, bahkan juga banyak pula penduduk yang bergantung pada buruh dan tani (Mubyarto dkk. 1994).

Kemiskinan secara menyeluruh di Indonesia merupakan masalah yang begitu panjang dikarenakan tendensinya yang makin meningkat dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada maret tahun 2018 tercatat di Indonesia memiliki 25,95 juta jiwa orang (9,82 persen) tersinyalir bahwa kependudukan di Indonesia termasuk golongan miskin. Data tersebut juga sudah termasuk wilayah pedesaan dan perkotaan sehingga sebagai pemerintah harus tegas dalam mengevaluasi dan mencari solusi bagi pengetasan kemiskinan agar tidak terjebak dengan status kemiskinan (BPS, 2018).

Berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah baik di rezim orde baru sampai saat ini masih dengan hal yang sama untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini bukan saja menjadi indikator utama yang masih berputar pada poros persoalan kemiskinan yang telah ada sejak lama, tetapi gejalanya seiring dengan krisis multidimensional yang masih saja di hadapi oleh Indonesia. Kondisi ini merupakan persoalan mengandung berbagai pendekatan-pendekatan dan upaya untuk menanggulangi permasalahan substansi dari tingkat kemiskinan itu sendiri, kemiskinan juga ada berbagai tampilan wajahnya yang memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Ada beberapa indikator permasalahan yang menyebabkan kegagalan pengentasan kemiskinan di Indonesia, selama ini berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain merumuskan berbagai standar obyektif garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan. Tetapi hingga sekarang persoalan kemiskinan belum membuahkan hasil yang memuaskan. Menurut (Setiadi dan Kolip, 2010), bahwa pada dasarnya ada dua indikator permasalahan yang penting yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu :

1. Program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada program bantuan sosial untuk orang miskin. Program tersebut antara lain Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) untuk orang miskin, pemberian beras miskin serta bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Hal-hal ini berorientasi pada heroik dan kedermawaan pemerintah, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan tersebut. Justru memperburuk moralitas dan perilaku masyarakat miskin.
2. Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program kemiskinan dan isu-isu penyakit kemiskinan yang melanda masyarakat local tidak mampu menganalisa lebih jauh.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam pelaksanaan program-program dan berbagai pendekatan sehingga pemerintah menggunakan pendekatan yang dianggap cukup ideal dalam pembangunan dengan adanya beberapa program untuk mendukung program tersebut pada era kabinet Indonesia bersatu (KIB)

II, presiden mengeluarkan perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memperlihatkan inisiatif, kreatifitas, aspirasi masyarakat dan memposisikan masyarakat sebagai subjek atau aktor pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung, baik di kota maupun di pedesaan (Janianton Damanik, 2015).

Secara umum pembangunan masyarakat pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas masyarakat desa dengan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya di lingkungan secara berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan program pembangunan masyarakat pedesaan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi serta mengelolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan segala pemanfaatan sebaik-baiknya dana dan daya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya (Mubyarto dkk. 1996)

Berbagai kebijakan dan program pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan dengan berbagai tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan juga keberlangsungan hidup masyarakat pedesaan. Dengan berlakukannya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan potensi yang di milikinya secara mandiri sesuai kebutuhan

masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan membangun desa, adanya permasalahan yang tidak bisa dilepaskan saja yakni pada persoalan keterlibatan masyarakat desa itu sendiri. partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan gerakan membangun dari desa.

Menurut PBB (United Nasional Midgley, 1986), adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil. Demikian juga menurut (panudju, 1996), bahwa partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam keterlibatan juga sendiri harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap : pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi (cohen dan uphodd, 1980).

Beberapa indikator permasalahan yang di hadapi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai subyek maka secara umum masyarakatlah yang melibatkan dirinya untuk mengakomodasi keinginan untuk mewujudkan kemandirian desa. Seperti halnya di kota Yogyakarta, yang sekarang ini sedang menjalankan program sekiranya bisa mengetaskan kemiskinan masyarakat di Yogyakarta.

Yogyakarta yang lekat dengan kota pendidikan juga memiliki *branding* sebagai kota pariwisata yang sudah dikenal para wisata diseluruh

penjuru, perkembangan pariwisata di kota Yogyakarta harus memperhatikan tumbuh kembangnya kondisi sosiologis masyarakat agar tidak hanya bertumpuh pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan juga memberikan dukungan bagi sektor perhotelan dan restoran maka hal ini tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta.

Beranjak dari konteks diatas, ada upaya dan gagasan untuk membangun desa wisata yang wujudnya mandiri, desa wisata dikembangkan sebagai upaya untuk membangun ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata di suatu wilayah yang dominan masyarakat sebagai tokoh utama pengembangan. desa wisata merupakan bentuk pariwisata yang memanfaatkan potensi alam yang cukup melimpah, dengan sengaja dibangun untuk mengajak masyarakat lokal maupun internasional mengenal lebih dekat kekayaan alam, budaya, maupun tradisi masyarakat di berbagai pelosok desa. Keterlibatan secara langsung masyarakat yang berpendapatan rendah melalui program-program pengembangan pariwisata pemanfaatan hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, serta produk hasil seni dan budaya tradisional serta pengembangan desa wisata sangat membantu usaha pengurangan kemiskinan itu sendiri (Oka A. yoeti, 2008).

Salah satu desa wisata yang terkenal di Indonesia yaitu Desa Pentingsari, yang berlokasi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa wisata ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 sampai sekarang. Perkembangan pariwisata di Desa Wisata

Pentingsari memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan, fisik, kondisi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut, khusus masyarakat Pentingsari. Adanya Desa Wisata Pentingsari memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan masyarakat Desa, seperti adanya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana. Selain itu desa wisata dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat Pentingsari, seperti usaha warung makan, penginapan, guide, tempat penitipan kendaraan, dan lain sebagainya. Sehingga mata pencaharian masyarakat desa mulai berfariasi atau beragam, yang dahulu sebelum dicanangkan sebagai desa wisata, sebagian besar penduduk pentingsari memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh (Himakova, 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Petingsari?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Pentingsari?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Untuk mendeskripsikan mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan berkaitan dengan urgensi atau hal-hal yang sangat diharapkan agar hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan untuk uji keilmiah dan dipertanggung-jawabkan baik secara teknis dan metodologis. Urgensi di dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu urgensi secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat praktis

- 1) Memberikan ilmu dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Pentingsari.
- 2) Memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat luas tentang wujud kemandirian desa
- 3) Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa berguna bagi masyarakat luas untuk melakukan kemandirian Desanya masing-masing.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bersama bagi penulis dan pembaca

- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah kekayaan konsep dan teori tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui desa wisata.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu kerangka teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran secara umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Berkaitan dengan topik yang akan peneliti lakukan, untuk itu ada beberapa kerangka teori yang akan dipakai sebagai dasar dalam penulisan ini, agar penulisan yang dilakukan peneliti menjadi terarah dan sistematis secara tepat. Persoalan dalam penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat, dikarenakan partisipasi masyarakat secara harfiah didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat (Mustofa, 2009). Maka dengan itu teori partisipasi peneliti menggunakan sebagai acuan yang terkait dengan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serata masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita, 2013).

Dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat, yang dimana sebagai perencanaan pembangunan untuk menjadikan lebih terarah dan sistematis, artinya rencana yang disusun itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi dalam penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat dilakukan penentuan prioritas dari besar kecilnya kepentingan. Dengan demikian maka implementasi dari program perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Ditambahkanlah masyarakat sebagai subyek untuk berperan lebih aktif, didorong untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, yang di maksud dengan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *capere*, yang diartikan mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Word Bank memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan, ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga

masyarakat mendapat keuntungan dari program tersebut (Karianga,2011).

Dalam prespektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik (Bell dan Morse,2008) yaitu :

- a. Memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan control dalam masyarakat,
- b. Memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antara warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan jaringan sosial untuk mengakses sebagai peluang,
- c. Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistematis dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ukuran terwujudnya kemandirian masyarakat merupakan hasil pencapaian partisipasi masyarakat. Menurut Korten (2012) dapat ditambahkan bahwa, dalam prespektif pembangunan berorientasi pada rakyat, untuk membangun kemandirian masyarakat perlu dikembangkan gerakan masyarakat. Gerakan itu dimaksud sebagai upaya menggerakkan

sebuah masa kritis secara terorganisasi dalam berpartisipasi masyarakat yang penuh dengan inisiatif, tidak tersentralisir, dan mandiri sehingga keadilan, berkelanjutan dan ketercukupan (Agusta, Tetiani & Fujiartanto, 2014).

Menurut Adisasmita (2013), partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program pembangunan, dan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Sebaiknya, masyarakat harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, dalam memiliki keahlian baru. Proses dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya (El-Mandary, n.d).

Konsep partisipasi dalam administrasi public merupakan hal yang penting dalam mewujudkan nilai demokrasi. Osborne dan gaebler mengungkapkannya ketika memasukkan prinsip *reinventing government* yaitu prinsip "*community owned government : empowering rather than serving*" yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Dan kemudian berkembang prespektif *new public service* yang lebih memperkuat kedudukan partisipasi masyarakat,

jati diri warga negara tidak dipandang sebagai persoalan kepentingan semata (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owner of government*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan public tidak dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan public dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama (Muluk, 2007).

Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan soal pengertian dari partisipasi masyarakat di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan yang bersentuhan secara langsung oleh masyarakat dalam suatu kebijakan pembangunan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diinginkan.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi masyarakat

Telah disinggung sebelumnya bahwa secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok, atau masyarakat ini dapat memberikan kontribusi/sumbangsi yang sekiranya dapat menunjang keberhasilan dari sebuah program pembangunan. Secara gambaran umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki

wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Menurut Huraerah, (2008). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

- a. partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *ajang sono*, pertemuan atau rapat;
- b. partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
- c. partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya;
- d. partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri;
- e. partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Sementara itu menurut Ndraha (1990), memberikan bentuk atau tahapan partisipasi menjadi 6 bentuk/tahapan, yaitu :

- a. partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;

- b. partisipasi dalam memerhatikan/menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi dan melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
- c. partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan;
- d. partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan;
- e. partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; dan
- f. partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut holil (dalam Isbandi,2007) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

- a. partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangsi uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau

seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.

- c. Partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Menurut Midgley bahwa partisipasi masyarakat menjadi 2, berbasiskan kriteria partisipasi masyarakat menurut Resolusi United Nasional Economic and Social Council tahun 1929. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat itu perlu memenuhi kriteria

- a. Adanya keterlibatan orang-orang yang sukarela dan demokratis dalam sumbangsuhnya terhadap usaha dalam program pembangunan
- b. Adanya penerimaan manfaat secara merata dikalangan masyarakat
- c. Pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi.

3. Tingkat partisipasi masyarakat

Untuk pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkat partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo (2008) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkat, yaitu : (a). partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana

masyarakat memberikan sumbangsi pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan. (b). partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda. (c). partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan masyarakat pada tahapan pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkat ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. (d). partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

4. Faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut yang didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung yaitu :

- a. Kemauan
- b. Kemampuan

- c. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi Dorodjatin (dalam Slamet, 2003).

Selain itu ada juga faktor menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson (dalam Soetomo,2008), mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu yang menjadi penyakit adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat secara aktif, dikarenakan rasa ketergantungan itu sendiri dari masyarakat sehingga tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Faktor-faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat tersebut dapat dibedakan menjadi 2 faktor yaitu :

- a. Faktor internal

Menurut Slamet (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkat laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapat, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan berpengaruh pada partisipasi.

b. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Loka, 2003), mengatakan bahwa faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam memposisikan kepentingan guna mengsucceskan program.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat telah dijabarkan oleh Payne (dalam Adi, 2012) bahwa pemberdayaan masyarakat itu ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial. Selain itu makna pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memampukan individu atau komunitas. Dimana pemberian wewenang atau kekuasaan tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri. Dari segi bahasa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha. Anwas (2013) menegaskan bahwa pemberdayaan (*empower*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*).

Banyak hal yang mengemukakan teori dan konsep mengenai pemberdayaan diantara Robbins, Chatterjee, & Canda (dalam Ramos dan Prideaux, 2014) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana yang individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses kesumberdaya dan keuntungan control atas hidup mereka. Sejalan dengan Rappaport (dalam Hamil dan Stein, 2011), pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif dimana orang yang kurang berdaya akan untuk memecahkan masalah pribadi dan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan berbagai hal salah satunya adalah dengan pembangunan sebuah desa menjadi desa wisata.

6. Kemandirian Desa

Dalam ilmu sosial, kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri. Sedangkan menurut Verhagen, (1996). Apabila melihat prespektif dari pembangunan masyarakat, bahwa kemandirian masyarakat merupakan keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, menurut Irfan (2018) yakni : (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi sumber daya manusia (SDM). Kemandirian desa dapat terwujud apabila ada

kerjasama antara elemen masyarakat dan juga pemerintah dengan komitmen kuat untuk melakukan perubahan terhadap ketergantungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memberdayakan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Dalam segi pembangunan bahwa kemandirian desa dimaknai sebagai perubahan sosial sehingga meliputi kondisi awal yang dapat diukur seperti kumulasi, potensi atau tingkat kemandirian saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai indikator eksisting desa yang pembangunan kemudian memanfaatkan (*Outcome*). Dalam jangka panjang, manfaat tersebut memberikan dampak yang diinginkan pembangunan (Agusta & Aji, 2014)

Dalam konteks global, kemandirian desa semakin relevan, agar Indonesia memiliki modal pengetahuan menyosong peluang konstruksi pengukuran baru, melalui modal pengetahuan kemandirian desa diharapkan menjadi negara yang mampu memberikan kontribusi yang mendalam untuk kemandirian desa dimasa mendatang. Indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum untuk kesejahteraan meliputi :

- a. Ekonomi masyarakat
- b. Pendidikan masyarakat
- c. Kesehatan masyarakat
- d. Lembaga masyarakat atau modal sosial

- e. Lingkungan hidup
- f. Keamanan dan ketertiban
- g. Kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan
- h. Peran serta masyarakat dalam pembangunan
- i. Peran swasta untuk meningkatkan daya saing (Agusta & Fujiartanto, 2014).

Desa bukan objek pembangunan, melainkan subyek yang bisa mandiri, termasuk mendesain sektor pembangunan mana yang paling prioritas bagi sebuah desa. Tugas negara terbatas pada penyediaan alokasi dana dan berbagai standar, sementara tugas membangun diserahkan kepada desa (Hasani, 2015).

7. Desa Wisata

Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat Desa yang berfungsi sebagai atribut produk Wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan dimiliki tema. Hasbullah Asyari mendefinisikan Desa Wisata sebagai sebuah Desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dapat dijual sebagai atraksi daya tarik wisata tanpa melibatkan investor (Asyari,2015). Desa tersebut mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata, baik dari aspek daya tarik maupun berbagai fasilitas pendukungnya (Demartoto dan Utami,2009). Ada beberapa hal juga mengenai Desa Wisata menurut Wiendu, (dalam Chusmeru dan Nuegroho,2010),

mendefinisikan Desa Wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya bebrbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan Wisata lainnya.

Dilihat dari prespektif lingkungan masyarakatnya, Desa Wisata merupakan bentuk pariwisata objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakat, panorama alamnya dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan, khususnya wisatawan asing. Salah satu unsur terpenting dalam pembangunan pariwisata pedesaan adalah keterlibatan masyarakat Desa dalam setiap aspek Wisata yang ada didesa tersebut (Demartoto dan Utami,2009).

Menurut Juliasetiono (2007), konsep desa wisata, meliputi :

- a. Berawal dari masyarakat
- b. Memiliki muatan lokal
- c. Memiliki komitmen bersama masyarakat,
- d. Memiliki kelembagaan,
- e. Adanya keterlibatan anggota masyarakat
- f. Adanya pendampingan dan pembinaan,

- g. Adanya motivasi,
- h. Adanya mitra,
- i. Adanya forum komunikasi, dan juga adanya studi orientasi

Menurut Oka A. Yoeti, pengantar ilmu pariwisata, 1985 desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Pengembangan pariwisata desa berbasis masyarakat menuntut koordinasi dan kerjasama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur *stakeholder* termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif menjadi salah satu pendekatan dalam mengembangkan pariwisata. Masyarakat setempat harus sadar atas potensi yang dimilikinya, mempunyai rasa memiliki terhadap sumber daya termasuk budayanya. pembangunan pariwisata desa berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial, maupun budaya kepada masyarakat setempat (Dermartoto, 2009) sampai saat ini, masyarakat desa pentingsari sudah dapat merasakan manfaat dari adanya aktivitas Desa Wisata.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam tahap ini berusaha untuk menjelaskan pengertian suatu konsep dengan konsep lain yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu aktifitas sekelompok masyarakat dengan kesediaan dan kemauan dalam tujuan untuk melakukan suatu kolektifitas masyarakat dalam membangun Desa secara mandiri.
2. Kemandirian Desa adalah suatu bentuk pengelolaan potensi Desa dalam bentuk ekonomi, sumber daya alam dan manusia untuk menjadikan desa tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal memberikan alokasi dana.
3. Desa Wisata merupakan penghargaan yang di berikan kepada Desa yang memiliki potensi sumberdaya alamnya.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah menentukan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Definisi oprasional menjelaskan cara tentukan yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan aplikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang baik (Sugiyono, 2014).

1. Bentuk Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu langkah utama dalam membangun sebuah Desa yang maju dan dapat mewujudkan kemandirian

Desa seperti yang di kemukakan oleh Midgley, bahwa ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat, antara lain :

- a. Sumbangsih atau bantuan
- b. Pengambilan keputusan
- c. Penerimaan manfaat secara merata

2. Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan wujud dari usaha merealisasikan dan mandiri secara pengelolaan desa tidak bergantung pada orang lain seperti yang dikemukakan oleh (Irfan, 2018) bahwa ada tiga sektor yang menjadi fokus dalam mewujudkan kemandirian Desa yaitu :

- a. Potensi ekonomi
- b. Potensi sosial
- c. Potensi sumberdaya manusia (SDM)

3. Desa Wisata

Desa Wisata merupakan suatu kawasan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan menurut (Juliasetiono, 2007) mengemukakan konsep Desa Wisata yaitu :

- a. Berawal dari masyarakat
- b. Memiliki muatan lokal
- c. Memiliki komitmen bersama masyarakat
- d. Memiliki kelembagaan
- e. Adanya keterlibatan masyarakat
- f. Adanya pendampingan dan pembinaan

- g. Adanya motivasi
- h. Adanya mitra
- i. Adanya forum komunikasi, dan adanya studi orientasi.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipercayai, maka diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah dibuat lebih terarah dan tepat. Dengan adanya metode agar menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian dalam mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Pentingsari tahun 2018 ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggali data secara akurat yang diperoleh dari sumber data (Nurboko dan Achmadi, 2007:1).

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode dalam pendekatan suatu penelitian dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek dan subjek penelitian suatu fakta yang nampak atau sebagaimana mestinya. Dengan demikian alasan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif lebih mudah memulai alur cerita. Dengan kata lain alur cerita yang diambil penulis adalah bagaimana masyarakat mewujudkan kemandirian Desa melalui sumber daya alamnya sebagai objek Wisata dalam meningkatkan pendapatan asli desanya.

2. Setting penelitian

Penelitian partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata ini terletak di Desa Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini karena tempatnya yang strategis dan mudah dijangkau selain itu Desa ini terletak di jalan alternatif untuk menjangkau keberbagai Daerah. Alasan lain juga dikarenakan Desa Wisata tersebut masih mengandalkan budaya dan alam sebagai tujuan utamanya dalam memberikan kontribusi kepada Desa tersebut.

3. Jenis Data

- a. Data primer adalah data peneliti yang diperoleh secara langsung oleh informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian ini dan mampu memberikan informasi serta yang berisi tentang variable penelitian, data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Retnandri, 2012).

Tabel 1.1 Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bentuk partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Desa Wisata Pentingsari	Pemerintah desa dan tokoh masyarakat	Wawancara
2.	Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui desa wisata	Pemerintah desa dan tokoh masyarakat	Wawancara

pentingsari

- b. Data sekunder adalah sebuah informasi yang kita dapatkan dari studi terdahulu seperti, jurnal, internet dan web serta pemerintah (Retnandri,2012).

Tabel 1.2 Data Sekunder

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan data
1	Profil Desa Wisata Pentingsari	Web Desa Disata Pentingsari (http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-strategi-dan-konsepnya.html)	Akses Internet
2	Kemandirian desa pentingsari	Web Desa Wisata Pentingsari (https://news.okezone.com/read/2019/07/16/1/2079692/semptaporak-poranda-desa-wisata-pentingsari-kini-tumbuh-dan-raih-banyak-prestasi)	Akses Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Maksud diadakannya wawancara adalah adalah merekonstruksi orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain (Lexy Moleong, 2001). Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan oleh :

- 1) Pemerintah Desa Pentingsari
- 2) Tokoh Masyarakat Pentingsari

- b. Dokumentasi

Teknik ini merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menyempurnakan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik dokumentasi harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan data untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen juga dapat berupa buku-buku, jurnal, atau gambar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Ketika melakukan wawancara peneliti sudah harus melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban dirasa kurang memuaskan maka peneliti akan kembali mengajukan pertanyaan sampai tahap tertentu dan memperoleh data yang dirasa akurat.

Secara umum teknik analisis data memiliki tahapan-tahapan kegiatan analisa dan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Proses mengumpulkan data-data penelitian yang didapatkan selama melakukan penelitian di lapangan sesuai dengan metode yang telah ditentukan.

b. Reduksi data

Proses seleksi dan penyederhanaan data yang didapatkan selama proses penelitian. Reduksi data dapat dilakukan hingga

seefektif dan seefesien mungkin sehingga hanya data yang diperlukan dan valid saja yang dijadikan sumber penelitian.

c. Penyajian data

Kumpulan dokumen atau informasi yang telah disusun dan dikategorikan yang membantu untuk proses penarikan kesimpulan.

d. Penarikan kesimpulan

Dari proses awal pengumpulan data peneliti harus sudah mengerti tentang hal-hal yang ditemui dalam penelitian. Dari data yang diperoleh di lapangan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan.